


Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno (1959-1965)


 **Ardi Tri Yuwono**

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

 arditriyuwono1945@gmail.com

 **Mustafa Basara**

Political Mass Media, Faculty of Economics & Political Science, Future University
in Egypt, Mesir

 mustafabasara1287@fue.edu.eg

*Korespondensi: arditriyuwono1945@gmail.com

Informasi Artikel

Dikirim: 08 September 2024
Revisi : 20 Desember 2024
Diterima: 27 Desember 2024
Terbit : 31 Desember 2024

Kata Kunci:

Historiografi Indonesia;
Demokrasi Terpimpin;
Nahdlatul Ulama;
Nasakom

Abstrak

The political and social dynamics in Indonesia continued to change during the old order which encouraged Nahdlatul Ulama (NU) to adopt the concept introduced by President Soekarno, namely guided democracy. Guided democracy in Indonesia occurred from 1959 to 1966, which placed all government power in the hands of President Sukarno. The aim of this research is to dig deeper into the reasons why NU adopted the concept of guided democracy. The methodology used in this research is a qualitative approach equipped with historical methods and political analysis methods. The findings of this research show that there are two factors that encouraged NU to adopt guided democracy, namely: (1) Overcoming threats from the Indonesian Communist Party in the Soekarno government, and; (2) Maintaining and expanding the position of Nahdlatul Ulama (NU) in politics and the Soekarno government.

Dinamika politik dan sosial di Indonesia yang terus berubah pada masa orde lama mendorong Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengadopsi konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia terjadi pada tahun 1959 hingga 1966, yang menempatkan seluruh kekuasaan pemerintah di tangan Presiden Sukarno. Tujuan penelitian ini adalah menggali lebih dalam mengenai alasan NU mengadopsi konsep demokrasi terpimpin. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan metode sejarah dan metode analisis politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong NU untuk mengadopsi demokrasi terpimpin, yaitu: (1) Menangkal ancaman dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam pemerintah Soekarno, serta; (2) Mempertahankan dan memperluas posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik dan Pemerintah Soekarno.

PENDAHULUAN

Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintah dan pemimpin pemerintah tersebut memiliki otoritas yang lebih dominan dalam mengarahkan dan mengendalikan dinamika politik, meskipun masih terdapat unsur-unsur demokrasi, seperti musyawarah.¹ Konsep ini sering kali merujuk pada struktur pemimpin atau partai tertentu yang mengatur dan mengontrol jalannya pemerintahan serta kebijakan publik, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan mengurangi potensi konflik di wilayah tertentu. Salah satu negara yang mempraktikkan demokrasi terpimpin adalah Indonesia, pada periode 1959-1965. Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlandaskan pada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965.² Ideologi demokrasi terpimpin berakar pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila ke-4 dari Pancasila). Inti dari prinsip ini adalah musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara kolektif antara seluruh kelompok nasionalis yang bersifat progresif, dengan landasan Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) yang mencerminkan sifat autokrasi.³

Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 mendapatkan respons dari Nahdlatul Ulama melalui penyelenggaraan Sidang Nahdlatul Ulama di Cipanas, Bogor, yang berlangsung pada 26-28 Maret 1958. Sidang tersebut memutuskan untuk menerima UUD 1945 yang secara mendasar menjadikan Piagam Jakarta sebagai inti dari konstitusi tersebut. Dengan kata lain, Piagam Jakarta memberikan jiwa kepada UUD 1945. Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) ini kemudian disampaikan kepada pemerintah, yang mengakibatkan Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 meminta Majelis Konstituante untuk mengadakan sidang dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia.⁴

Pada akhir tahun 1958 dan awal tahun 1959, Presiden Soekarno mengemukakan gagasan baru untuk memasukkan golongan fungsional ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Golongan fungsional ini berfungsi sebagai pendukung Presiden Soekarno dalam menampung serta menyalurkan aspirasi dari berbagai kelompok elite politik yang ada di masyarakat. Adapun

¹ Tasneem Sultana, "The Evolution of Democracy through the Ages: Focus on the European Experience," *Journal of European Studies*, Vol. 28 no. 1 January 2012 (2012): 27–50, <https://www.researchgate.net/publication/328576959>.

² Marle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Serambi Ilmu Semesta, 2001).

³ Ricklefs.

⁴ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989).

golongan fungsional mempunyai peran sebagai penasihat negara terhadap upaya memperlancar jalannya pemerintahan dan menciptakan Keseimbangan politik di Indonesia demi mendukung kemajuan nasional.⁵ Isu mengenai golongan ini merupakan salah satu inti pembahasan yang krusial dalam dinamika politik Indonesia pada masa itu. Tanggapan dari Nahdlatul Ulama, yang pada saat itu merupakan sebuah partai politik, menunjukkan kesadaran bahwa Presiden Soekarno adalah sosok yang paling berpengaruh di Indonesia. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menyetujui ide Presiden Soekarno untuk memasukkan golongan fungsional ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan syarat bahwa demokrasi yang sehat harus diterapkan demi kepentingan masyarakat Indonesia.⁶

Sikap Nahdlatul Ulama terhadap sistem demokrasi terpimpin menunjukkan pendekatan yang lebih realistis dan pragmatis. Saifuddin Zuhri, sebagai salah satu tokoh politik Nahdlatul Ulama, mengemukakan bahwa pesantren dalam konteks Nahdlatul Ulama seharusnya beradaptasi dengan sistem yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, dengan mengutip prinsip "*maa la yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu*" (sesuatu yang tidak bisa diraih secara keseluruhan tidak boleh ditinggalkan sama sekali).⁷ Berdasarkan prinsip ini, Nahdlatul Ulama dalam kalangan elite politik memutuskan untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi terpimpin. Dukungan Nahdlatul Ulama terhadap sistem ini dinyatakan pada tanggal 11 Januari 1959, saat Presiden Soekarno melakukan musyawarah dengan perwakilan dari Nahdlatul Ulama, yang dihadiri oleh Abdul Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Djamaluddin Malik, dan Zainul Arifin Pohan. Ketika ditanya mengenai sikap Nahdlatul Ulama terhadap demokrasi terpimpin, Zainul Arifin Pohan menegaskan bahwa semua pihak mengetahui bahwa posisi Nahdlatul Ulama adalah mendukung demokrasi terpimpin yang berlandaskan Hikmat dan Permusyawaratan.⁸

Nahdlatul Ulama dalam mengadopsi konsep demokrasi terpimpin serta gagasan Nasakom yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, didasari oleh

⁵ Himawan Indrajat, "Demokrasi Terpimpin: Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 18 no. 1 (2014): 53–62.

⁶ Hari Zamharir, dkk., "Elite Deliberation as Deliberative Democracy: Experience of Walisongo and Nahdlatul Ulama in Indonesia," *Journal of Social Political Sciences*, Vol. 1 no. 4 (2020): 285–97, <http://e-journal.unas.ac.id/index.php/jsps/article/view/31%0A>.

⁷ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Jayatu, 1985).

⁸ Jainuddin, "Islam dan Politik Orde Lama: Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 3 no. 2 (2019): 225–43, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.470>.

prinsip keagamaan, yaitu "*Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jabbil Mashalih*", yang mengisyaratkan bahwa menghindari keburukan lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.⁹ Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam proses politik penyesuaian diri selama era demokrasi terpimpin, yang menghasilkan dampak positif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia serta dalam konteks *Izzatul Islam wal Muslimin*. Hal ini merupakan puncak keberhasilan Nahdlatul Ulama dalam dinamika politik nasional pada masa tersebut.¹⁰

Dewan Nasional (badan penasihat pada masa demokrasi liberal yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1957) dibubarkan pada tanggal 12 Juli 1959 dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).¹¹ MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) juga dibubarkan dan digantikan oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara). Selain itu, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dibubarkan dan digantikan oleh DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), serta Manipol (Manifesto Politik) Usdek (Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno berupaya untuk menyatukan kekuatan besar di antara kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis yang dikenal sebagai istilah Nasakom.¹² Dalam konteks demokrasi terpimpin (1959-1965), Abdul Wahab Chasbullah secara kritis memanfaatkan situasi ini dan berhasil menangkap momen psikologis masyarakat Indonesia. Ketika diadakan musyawarah daerah mengenai keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang diisi golongan fungsional, strategi yang diterapkan oleh Abdul Wahab Chasbullah mendapatkan dukungan yang signifikan. Abdul Wahab Chasbullah mengambil keputusan terkait Nahdlatul Ulama yang bergabung dengan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), sementara urusan hasil musyawarah daerah dan penolakan terhadap DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dianggap sebagai hal yang dapat dibahas kemudian hari.¹³

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama memainkan peran yang signifikan dalam DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dan mampu menghadapi periode demokrasi terpimpin, pada tahun 1959 hingga 1965. Pada masa tersebut, pemikiran Nahdlatul Ulama berfokus pada

⁹ Jainuddin.

¹⁰ Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*.

¹¹ Pardiyo, "Dewan Nasional: Suatu Badan Penasehat Pemerintah 1957-1959," *Skripsi*, (Universitas Indonesia, 1989).

¹² Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*.

¹³ Jainuddin, *Islam dan Politik Orde Lama: Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno*.

penanganan situasi politik yang realistis dan penuh tantangan yang dihadapi selama demokrasi terpimpin. Salah satu alasan utama Nahdlatul Ulama mengadopsi konsep demokrasi terpimpin adalah untuk merekonstruksi kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kehidupan masyarakat saat itu.¹⁴ Dengan demikian, Nahdlatul Ulama menerima Dekret Presiden yang diberlakukan pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai langkah awal pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia.

Penelitian sebelumnya mengenai Nahdlatul Ulama dalam konteks demokrasi terpimpin (1959-1965) serta peran Nahdlatul Ulama selama periode demokrasi terpimpin (1959-1965) telah banyak dilakukan. Namun, penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas faktor-faktor yang mendorong Nahdlatul Ulama untuk mengadopsi konsep demokrasi terpimpin. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor dan kondisi di Indonesia yang menjadi pendorong bagi Nahdlatul Ulama untuk berpartisipasi dalam konsep demokrasi baru yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Dengan fokus pada tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor pendorong serta tantangan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama dalam konteks perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Untuk itu, peneliti merumuskan judul penelitian, yaitu Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno (1959-1965).

Penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi, mengingat banyak negara saat ini menghadapi tantangan dalam perubahan sistem demokrasi. Memahami sejarah dan strategi organisasi, seperti Nahdlatul Ulama dalam menghadapi demokrasi terpimpin antara tahun 1959 hingga 1965 dapat memberikan wawasan baru dalam mencari solusi untuk permasalahan demokrasi yang dihadapi saat ini. Dengan menganalisis bagaimana Nahdlatul Ulama beradaptasi dengan dinamika politik di masa lalu, penelitian ini berpotensi memberikan pelajaran berharga bagi organisasi keagamaan dan politik di era kontemporer dalam menavigasi perubahan sistem pemerintah dan partisipasi politik. Hipotesis yang diajukan terkait penelitian ini adalah bahwa Nahdlatul Ulama mengadopsi konsep demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno selama periode 1959-1965, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakstabilan politik di Indonesia, upaya Soekarno untuk menciptakan pluralisme di masyarakat Indonesia, serta kondisi ekonomi yang memburuk setelah era demokrasi liberal (1950-1959). Dengan menerapkan

¹⁴ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1978).

pendekatan kualitatif disertai metode sejarah dan metode analisis politik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan Nahdlatul Ulama dalam mengadopsi demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah dan analisis politik dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial.¹⁵ Dalam konteks ini, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, peristiwa sosial, dan sudut pandang seseorang atau kelompok melalui pengumpulan data yang bersifat non-numerik.¹⁶ Pendekatan ini sering kali digunakan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat eksploratif dan kompleks, serta hasil penelitiannya bersifat kontekstual.¹⁷ Dengan demikian, pendekatan kualitatif lebih mengedepankan pemahaman holistik dibandingkan dengan pengukuran yang presisi.¹⁸ Adapun pendekatan kualitatif yang disertai metode sejarah dan metode analisis politik telah digunakan banyak peneliti untuk menganalisis peristiwa politik di masa lampau.¹⁹

Metode sejarah merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk memahami konteks, penyebab, serta dampak yang ditimbulkan.²⁰ Terdapat empat tahap dalam metode sejarah, yaitu (1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi.²¹ Tahap pertama, yaitu heuristik yang melibatkan pencarian, penghimpunan, dan pemilahan sumber sejarah yang relevan, seperti buku dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya. Setelah sumber-sumber tersebut dikumpulkan, peneliti melanjutkan ke tahap kedua, yaitu kritik sumber yang berfokus pada verifikasi terhadap keaslian dan kredibilitas sumber sejarah. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dengan

¹⁵ John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating: Quantitative and Qualitative Research* (Boston: Pearson, 2012).

¹⁶ Howard Lune & Bruce Lawrence Berg, *Methods for the Social Sciences Global Edition* (Harlow: Pearson, 2017).

¹⁷ Adhi Kusumastuti & Admad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

¹⁸ Adlin, *Metode Penelitian Sosial* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2013).

¹⁹ Jonathan Gorman, *Understanding History" An Introduction to Analytical Philosophy of History*, (Ottawa University of Ottawa Press, 1992).

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Sleman: Tiara Wacana, 2018).

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

mempertimbangkan konteks sosial dan politik pada masa itu. Tahap terakhir, yaitu historiografi, melibatkan penyusunan narasi atau laporan yang menjelaskan hasil penelitian, termasuk penjelasan mengenai peristiwa, proses, dan dampaknya, serta hubungan antara semua elemen tersebut.

Metode analisis politik merupakan suatu pendekatan yang diterapkan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai fenomena politik, termasuk kebijakan, perilaku politik, organisasi politik, serta struktur dan proses pemerintahan.²² Dengan mengikuti metode ini, peneliti dapat memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai cara kerja organisasi politik dan kebijakan publik dalam konteks masyarakat, serta dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan pada bukti untuk meningkatkan kebijakan dan praktik politik di dalam suatu organisasi politik.²³ Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan metode sejarah dan metode analisis politik dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor pendorong Nahdlatul Ulama dalam mengadopsi demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965, sehingga peneliti dapat memberikan wawasan terkait Nahdlatul Ulama yang beradaptasi dengan dinamika politik di periode tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan teori sistem politik yang

menganalisis hubungan antara berbagai tokoh politik dalam suatu sistem negara.²⁴ Adapun penelitian ini juga memanfaatkan teori perspektif sosial untuk mengeksplorasi interaksi sosial dan dinamika kelompok sosial dalam konteks sejarah.²⁵

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengadopsi demokrasi terpimpin, yaitu: (1) Menanggulangi ancaman dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam pemerintah Soekarno, serta; (2) Mempertahankan dan memperluas posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik dan Pemerintah Soekarno. Penjelasan dua faktor tersebut dijabarkan dalam sub bab sebagai berikut.

²² Pipin Hanapiah, *Analisis Politik* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2001).

²³ Toto Pribadi, Ali Muhyidin, & Susanti, *Pendekatan Analisis Sistem Politik* (Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, 2017).

²⁴ Pribadi, Muhyidin, and Susanti.

²⁵ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.

Menanggulangi ancaman dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam pemerintah Soekarno

Kondisi sosial di Indonesia yang mendorong Nahdlatul Ulama (NU) untuk terlibat dalam politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), dengan tujuan untuk menanggulangi ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam upaya melawan PKI, NU perlu berpartisipasi dalam elemen Nasakom serta dalam arena politik nasional. Pendekatan ini dikenal sebagai berjuang dari dalam pemerintah Soekarno. Apabila NU memilih untuk berjuang dari luar pemerintah Soekarno, maka NU tidak akan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam menanggulangi gerakan PKI, sehingga PKI akan memiliki peluang yang lebih besar untuk merealisasikan agenda politiknya, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara komunis. Dengan demikian, NU memutuskan untuk mengadopsi Konsep demokrasi terpimpin sebagai respons terhadap kondisi Indonesia pada waktu itu.²⁶

Pada era demokrasi terpimpin, terjadi konflik ideologis yang signifikan antara paham komunis dan paham antikomunis dalam masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Soekarno menciptakan konsep Nasakom, yang mempersatukan golongan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Inisiatif ini dapat dipahami sebagai usaha untuk menemukan kesepakatan atau persatuan yang sesuai bagi seluruh lapisan masyarakat. Presiden Soekarno berupaya untuk mengintegrasikan dan menyatukan berbagai ide yang berkembang di masyarakat menjadi suatu gagasan baru yang dapat diterima oleh semua pihak.²⁷ Konsep persatuan yang diusung melalui Nasakom menggambarkan konsistensi pemikiran Presiden Soekarno, yang juga tercermin dalam tulisannya pada tahun 1926 berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.²⁸

Kondisi masyarakat Indonesia saat itu adalah meningkatnya pengaruh kekuatan PKI. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan entitas yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah perkembangan bangsa. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) terpaksa menjalin kerja sama dengan pihak yang secara ideologis berseberangan, dengan tujuan utama untuk menghalangi aktivitas dan aspirasi politik PKI. Meskipun NU semakin menguat dalam struktur pemerintah Soekarno, NU tetap waspada

²⁶ Mary Somers Heidhues, "The 1965-66 Elimination of Indonesian Communists: Two Recent Re-Readings," *Archipel*, Vol. 101, no. 1 (2021): 255-58, <https://doi.org/10.4000/archipel.2460>.

²⁷ Moh Arif Arifin, "Idham Chalid Dan Perannya Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966 M" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

²⁸ Sigit Parikeset & Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1* (Jakarta: Banana Books, 2016).

terhadap PKI, yang juga berperan sebagai pelopor dalam menafsirkan gagasan-gagasan Presiden Soekarno. PKI menginterpretasikan ide-ide Soekarno melalui lensa Marxisme dan Maoisme, yang mencerminkan ideologi mereka. Dengan cara ini, PKI berhasil membayar utang politik kepada Soekarno dengan memberikan perlindungan dan mengintegrasikan ideologi mereka ke dalam kebijakan pemerintah. Soekarno secara pribadi memiliki kecenderungan positif terhadap PKI. Hal ini disebabkan PKI dianggap revolusioner dan sesuai dengan keinginan politik Soekarno.²⁹ Selain itu, PKI mempunyai struktur kelompok yang teratur dan loyal, yang dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kekuatan militer. Meskipun militer merupakan kaki tangan Soekarno dalam membangun konsep demokrasi terpimpin, Soekarno selalu takut akan kemungkinan militer mengambil alih kekuasaan politik darinya.³⁰

Berdasarkan kondisi sosial dan politik saat itu, Idham Chalid dan Nahdlatul Ulama (NU) secara umum berupaya menunjukkan bahwa Islam dapat berintegrasi dengan pemikiran Presiden Soekarno, yang pada masa itu memiliki pengaruh yang signifikan. Idham Chalid berkeinginan untuk menegaskan bahwa kekuatan Islam mampu memberikan dukungan terhadap revolusi yang diusung oleh Presiden Soekarno, yang juga mendapat dukungan dari kalangan komunis dan pengikutnya. Pada saat itu, tujuan NU adalah untuk mengurangi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap Presiden Soekarno dengan mengalihkan perhatian kepada kekuatan lain yang berpotensi, yaitu kekuatan umat Islam yang dipimpin oleh NU serta kekuatan nasionalis.³¹ Pertarungan antara NU dan PKI tercermin dalam sebuah sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada tahun 1959. Pertarungan tersebut ditandai dengan D.N. Aidit (dari PKI) mengajukan persoalan yang dianggap oleh Saifuddin Zuhri (Menteri Agama pada waktu itu) sebagai bentuk satire ideologis. D.N. Aidit mengajukan persoalan tersebut kepada Presiden Soekarno sebagai berikut:

“Bapak Presiden (Soekarno), saya ingin bertanya kepada Bapak Menteri Agama yang berada di sebelah kanan saya mengenai hukum konsumsi daging tikus dalam perspektif Agama Islam?”³²

Selanjutnya, Saifuddin Zuhri memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Saya merasa terprovokasi oleh satire yang dilontarkan di hadapan publik dan di hadapan (Bapak) Presiden. Padahal jarak antara kami

²⁹ Asep Achmad Hidayat, dkk., “Nahdlatul Ulama in Facing the Guided Democracy 1959-1965: An Overview of Social and Political Factors,” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 20, no. 2 (2022): 567–98, <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1069>.

³⁰ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*.

³¹ Arifin, *Idham Chalid dan Perannya Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966 M*.

³² Saifuddin Zuhri, *Autobiografi KH. Saifuddin Zuhri: Berangkat Dari Pesantren* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1984).

(D.N. Aidit & Saifuddin Zuhri) hanya sekitar 20 cm. Meskipun saya menjabat sebagai Menteri, saya tetap merupakan anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Selain itu, sebagai pemimpin kelompok (Islam), D.N. Aidit seharusnya telah memahami persoalan yang diajukan dan mengetahui pandangan umat Islam di Indonesia mengenai hukum konsumsi daging tikus. Namun, D.N. Aidit dengan sengaja menunjukkan sikap antipatinya terhadap Islam. Bapak Presiden (Soekarno), mohon sampaikan kepada orang di sebelah kiri saya bahwa saya sedang berjuang agar masyarakat dapat menikmati ayam goreng. Oleh karena itu, jangan sampai perhatian masyarakat teralihkan untuk mengonsumsi daging tikus!"³³

Tanggapan Saifuddin Zuhri tersebut memicu tawa di kalangan anggota sidang, termasuk Soekarno yang memimpin Dewan Pertimbangan Agung (DPA).³⁴ NU menghadapi tantangan dari PKI pada saat pengaruh dan jaringan PKI telah menyusup ke dalam struktur pemerintah, baik di jenjang pusat maupun daerah, serta merasuki berbagai elemen kelompok sosial, seperti angkatan bersenjata, pemuda, pelajar, mahasiswa, seniman, wartawan, pegawai negeri, buruh, petani, dan budayawan.³⁵ Jika Indonesia diilustrasikan sebagai sebuah tubuh manusia, NU pada waktu itu berhadapan dengan kenyataan bahwa cengkeraman berbahaya dari kanker hampir mengancam keseluruhan tubuh. Meskipun demikian, NU tidak menyerah untuk menyelamatkan bagian-bagian tubuh yang masih dapat dipertahankan dari pengaruh kanker tersebut. Tugas ini tentu saja sarat dengan tantangan dan penuh risiko. Namun, NU tetap berpegang pada ketabahan dan kesabaran, dengan keyakinan bahwa mereka akan mampu mengatasi gerakan PKI di masa yang akan datang.³⁶

Pada masa itu, sejumlah pihak dari kelompok lain menuduh Abdul Wahab Chasbullah dan Nahdlatul Ulama (NU) berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama setelah NU menyatakan bergabung dengan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) dan menjadi satu-satunya elemen keagamaan dalam konsep politik tersebut.³⁷ Setelah bergabung dalam

³³ Zuhri.

³⁴ Zuhri.

³⁵ Muhammad Thohari, "K.H. Abdul Wahab Hasbullah: Kiprahnya Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004).

³⁶ Hidayat, dkk. *Nahdlatul Ulama in Facing the Guided Democracy 1959-1965: An Overview of Social and Political Factors*.

³⁷ Thohari, K.H. *Abdul Wahab Hasbullah: Kiprahnya Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965*.

Nasakom, strategi dan taktik NU selanjutnya adalah bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk menghadapi berbagai aksi PKI,, terutama saat terjadinya Gerakan 30 September (Gestapu) pada tahun 1965. Hal ini menunjukkan bahwa NU memberikan dukungan yang signifikan kepada ABRI tanpa mengharapkan imbalan. Dukungan yang diberikan oleh NU sejalan dengan tujuan organisasi untuk mencapai stabilitas negara serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera, bahagia, dan taat kepada Allah Swt.³⁸

Pada masa awal demokrasi dipimpin di Indonesia, kondisi politik dan sosial menunjukkan kedekatan Presiden Soekarno terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menjadi sumber kekhawatiran bagi Nahdlatul Ulama (NU). Dalam situasi tersebut, NU tidak memiliki pilihan lain selain menerima sistem demokrasi dipimpin dan bersikap adaptif terhadap Presiden Soekarno. Tindakan ini diambil agar perhatian Presiden Soekarno tidak hanya terfokus pada PKI, melainkan juga terfokus pada NU dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga fokus perhatian Presiden Soekarno terbagi menjadi tiga, yaitu NU, PKI, dan ABRI. Langkah-langkah yang diambil oleh NU bertujuan untuk melindungi Indonesia serta mempertahankan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, strategi politik NU yang memilih untuk menerima dan berpartisipasi dalam politik Nasakom bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia, dari pengaruh dan tindakan sepihak PKI. Dengan demikian, alasan NU mengadopsi konsep demokrasi dipimpin adalah untuk menghalau pengaruh PKI dari dalam pemerintah Soekarno daripada melawan dari luar pemerintah Soekarno.

Jika Nahdlatul Ulama (NU) berupaya berjuang di luar pemerintah Soekarno, maka kemungkinan besar mereka akan menghadapi kesulitan yang serupa dengan yang dialami oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Perbedaan sikap politik NU terhadap konsep demokrasi dipimpin sangat kontras dengan Masyumi, yang menolak konsep tersebut dan menolak PKI (Partai Komunis Indonesia) di pemerintah Soekarno. Penolakan Masyumi terhadap demokrasi dipimpin dan PKI menyebabkan Masyumi tidak sejalan dengan Presiden Soekarno, yang mengakibatkan pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.³⁹

Setelah Masyumi dibubarkan, Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai partai Islam yang memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik Indonesia selama era demokrasi dipimpin. Hal ini tidaklah mustahil,

³⁸ Zuhri, *Autobiografi KH. Saifuddin Zuhri: Berangkat Dari Pesantren*.

³⁹ Muhammad, "Nahdlatul Ulama dan Perubahan Budaya Politik di Indonesia," *El-Harakah*, Vol 12, no. 1 (2010): 57-65, <https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/>.

mengingat NU sebelumnya berhasil meraih kemenangan melalui pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pada konteks politik, NU memilih untuk berkompromi dengan Presiden Soekarno, tetap beroperasi dalam kerangka politik yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. NU berperan sebagai partai pendukung pemerintah, bersinergi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.⁴⁰

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam strategi dan taktik yang diterapkan oleh NU dan Masyumi dalam menghadapi PKI (Partai Komunis Indonesia). Taktik yang diadopsi oleh Masyumi yang berujung pada pembubaran organisasi Masyumi karena menolak bersahabat dengan PKI. Sebaliknya, NU memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih bersahabat dengan PKI. Dengan demikian, NU memanfaatkan taktik tersebut untuk berpartisipasi dalam sistem politik Soekarno guna mengatasi pengaruh PKI dari dalam pemerintah Soekarno. NU mengamati nasib Masyumi yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno sebagai suatu tindakan yang terlalu kaku dan idealis. Dengan mengambil posisi di dalam pemerintah Soekarno, NU dapat terus melayani dan membela kepentingan masyarakat Indonesia serta menghalau PKI dari dalam struktur pemerintah Soekarno. Oleh karena itu, keputusan NU untuk mengadopsi konsep demokrasi terpimpin dan bergabung dengan pemerintah Soekarno pada saat itu didasarkan pada upaya untuk menghindari ancaman pembubaran organisasi NU oleh Presiden Soekarno.

Mempertahankan dan Memperluas Posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Politik dan Pemerintah Soekarno

Nahdlatul Ulama (NU) yang dipimpin oleh Idham Chalid akhirnya mengakui bahwa konsep demokrasi terpimpin yang diusulkan oleh Presiden Soekarno tidak dapat diperdebatkan. NU menerima konsep ini didasarkan pada pertimbangan politik, yaitu untuk mempertahankan posisi NU dalam konteks perpolitikan nasional.⁴¹ Para elite politik NU pada waktu itu meyakini bahwa politik merupakan alat untuk merealisasikan kepentingan masyarakat dan berkontribusi kepada masyarakat.⁴² Kehilangan posisi di arena politik

⁴⁰ Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 42, no. 1 (2020): 58–84, <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>.

⁴¹ Rina Andriani Hidayat, "The Existence of The Nahdlatul Ulama Party in The Guided Democracy Era," *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, Vol. 3, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.35672/jnus.v3i1.1-21>.

⁴² Muhammad R Damm, "The (Trans)Formation of Religious Capital in Indonesian Politics During New Order Era: A Case Study Of Nahdlatul Ulama," *Journal of*

nasional akan mengakibatkan NU tidak mampu berperan dalam meraih cita-citanya, baik sebagai organisasi keagamaan ataupun sebagai partai politik. Saat penerapan demokrasi terpimpin, NU banyak mengadopsi strategi akomodasi politik. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada saat itu percaya bahwa menentang Presiden Soekarno dan konsep demokrasi terpimpin adalah tindakan yang tidak sia-sia dan berisiko tinggi.⁴³ Presiden Soekarno dan militer pada masa itu memiliki kekuatan serta dukungan yang signifikan dari masyarakat untuk melakukan perubahan dan menghukum pihak-pihak yang menolak konsep demokrasi terpimpin.⁴⁴

Menentang dan melawan pemerintah Soekarno yang sah dapat memberikan konsekuensi negatif bagi kepentingan Nahdlatul Ulama (NU) dalam aspek politik, agama, sosial, dan ekonomi. Pada masa itu, NU beranggapan bahwa menjaga posisi dalam pemerintahan merupakan suatu keharusan. Selama empat tahun terakhir sebelum dimulainya era demokrasi terpimpin (1955-1959), NU sangat bergantung pada pemerintah Presiden Soekarno. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat nahdliyin yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil, serta sebagian besar pendanaan terkait pesantren NU dan madrasah NU bersumber dari pemerintah Presiden Soekarno.⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan politik yang ada, PBNU memutuskan untuk menerima konsep demokrasi terpimpin. Selanjutnya, NU berupaya untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi yang baru agar kepentingan partai dapat terakomodasi. PBNU menyatakan bahwa tujuan utama NU hanya dapat dicapai dengan berpartisipasi dalam kabinet dan pemerintahan Soekarno. Dengan langkah ini, NU tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjaga solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia serta menentang paham komunisme dari dalam pemerintah Soekarno. Kekuatan posisi Presiden Soekarno yang semakin meningkat selama periode demokrasi terpimpin menjadikan NU sebagai pendukung setia Sukarno, dengan tujuan memastikan keberadaan NU dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, NU memilih untuk mengadopsi pendekatan yang bersahabat terhadap Presiden Soekarno. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan Abdul Wahab Chasbullah, sebagai berikut..

Indonesian Social Sciences and Humanities 8, no. 2 (2018): 154–57,
<https://doi.org/10.14203/jissh.v8i2.96>.

⁴³ Anjar Junaedi, "Perilaku Politik Nahdlatul Ulama (NU) Pada Tahun 1952-1965" *Skripsi* (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2005).

⁴⁴ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*.

⁴⁵ Junaedi, *Perilaku Politik Nahdlatul Ulama (NU) Pada Tahun 1952-1965*.

“Apabila kita (NU) cermat dalam menyampaikan gagasan-gagasan, maka beliau (Soekarno) akan mampu mempertimbangkan rencana tersebut secara kolaboratif (dengan NU), bahkan mungkin akan menyetujui beberapa gagasan (NU) yang kita ajukan.”⁴⁶

Dengan diterimanya proses restrukturisasi politik ini, Nahdlatul Ulama (NU) berhasil mempertahankan posisinya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin (1959-1965). NU memiliki perwakilan di seluruh lembaga, bahkan menjadi partai Islam terbesar di Indonesia pada era demokrasi terpimpin. Selain itu, NU juga berperan sebagai elemen penting dalam organisasi keagamaan yang terhimpun dalam Nasakom. Peralihan menuju sistem demokrasi terpimpin menunjukkan bahwa NU dalam sikap akomodatifnya, bersedia untuk berkompromi dengan pemerintah Presiden Soekarno di hampir semua sektor. Satu-satunya pengecualian terhadap dukungan NU terjadi ketika kebijakan yang diambil pemerintah Soekarno dianggap sebagai intimidasi langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, selama Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada NU untuk mengambil alih beberapa kementerian dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan kesejahteraan masyarakat, NU akan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah Soekarno. Sikap NU yang cenderung menghindari risiko ini membuatnya terhindar dari konfrontasi dengan Presiden Soekarno. Hal ini dapat dilihat dalam pidato Ketua Umum PBNU, Idham Chalid, sebagai berikut:

“Apabila tidak cermat, ketidaktahuan terhadap arah mata angin, dan sedikit saja ketidaksesuaian dalam pengendalian terhadap gelombang air laut yang dapat menyebabkan kapal ini (organisasi Nahdlatul Ulama) beserta seluruh awak kapal (anggota NU), dapat menyebabkan kita (NU) tenggelam. Dalam menghadapi berbagai kemungkinan, kita perlu mengakomodasi setiap situasi, sehingga ketika dinamika yang cepat akibat revolusi menghasilkan peristiwa dan perkembangan baru, organisasi kita (NU) dapat dengan sigap menyesuaikan diri dan berada pada posisi yang paling aman.”⁴⁷

Dengan diadopsinya konsep demokrasi terpimpin oleh Nahdlatul Ulama (NU), hubungan antara NU dan Presiden Soekarno mengalami

⁴⁶ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: Pusat Kajian Islam dan Transformasi Sosial, 2009).

⁴⁷ Suryawan Andian Alim, “Peran Politik Idham Chalid Dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1956-1984,” *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* Vol. 4, no. 7 (2019): 1-14, <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilmu-sejarah/article/view/16591>.

peningkatan terkait kedekatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada acara penutupan Kongres Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Surakarta pada tanggal 29 Desember 1962, sebagai berikut:

“Saya (Soekarno) memiliki rasa cinta terhadap NU, dan NU juga mencintai saya (Soekarno). Saya (Soekarno) rangkul NU, dan NU rangkul saya (Soekarno)”⁴⁸

Berdasarkan fakta sejarah yang ada, dapat disimpulkan bahwa alasan di balik penerimaan NU terhadap konsep demokrasi terpimpin yang diusung oleh Presiden Soekarno adalah untuk menjaga dan memperkuat posisi politik yang telah diraih oleh NU selama masa kepemimpinan Soekarno. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan sikap pragmatis dan oportunistik NU, tetapi juga menunjukkan bahwa selama keterlibatannya dalam politik di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, NU berhasil menghindari konflik dan perpecahan politik yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kekerasan serta ancaman terhadap keberadaan NU itu sendiri.

SIMPULAN

Sebagai organisasi Islam yang paling besar dalam historiografi Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) telah menerapkan berbagai strategi dan upaya untuk mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika politik Indonesia. Pada era demokrasi terpimpin, NU dihadapkan pada dilema mengenai dukungan terhadap demokrasi terpimpin atau menolak demokrasi terpimpin tersebut. NU memilih untuk mendukung demokrasi terpimpin dan bahkan berpartisipasi aktif dalam sistem tersebut. Keputusan NU ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Mengatasi ancaman dari PKI (Partai Komunis Indonesia) yang berpotensi memengaruhi pemerintahan Soekarno melalui kompromi politik dengan Presiden Soekarno dan masuk ke dalam koalisi Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme); (2) Risiko pembubaran organisasi NU jika menolak demokrasi terpimpin dan berposisi sebagai oposisi di luar pemerintah Soekarno; serta (3) Upaya untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh NU dalam arena politik Indonesia selama periode demokrasi terpimpin (1959-1965).

Faktor-faktor tersebut, mendorong Nahdlatul Ulama (NU) untuk menerima demokrasi terpimpin, yang disebabkan oleh kebutuhan untuk berpartisipasi dalam politik nasional demi mewakili umat beragama dalam

⁴⁸ Mukafi Niam Achmad, *Fragmen-Fragmen Mukhtamar NU Dari Era Kolonial Hingga Milenial* (Jakarta: Numedia Digital Indonesia, 2021).

menghadapi ancaman ideologi komunisme dan pengaruh politik Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa itu. Ketiga faktor tersebut muncul dari keinginan NU untuk mempertahankan posisi dan perannya dalam pemerintahan Presiden Soekarno, yang telah ada sejak periode demokrasi liberal (1950-1959). Dengan demikian, NU menerima demokrasi terpimpin (1959-1965) sebagai upaya untuk mengamankan beberapa posisi strategis dalam pemerintah Soekarno, yang pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menanggulangi pengaruh PKI dalam struktur pemerintahan tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap historiografi Indonesia dengan menyoroti strategi yang cerdas dan efektif dari Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghadapi tantangan yang ada. Mereka berhasil mempertahankan prinsip dasar mereka di era demokrasi terpimpin, yaitu *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), serta *tasamuh* (toleran). Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi keberlanjutan NU dalam konteks politik saat ini atau dalam periode politik yang berbeda. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman bagi organisasi-organisasi keagamaan dan politik saat ini, mengenai cara beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pemerintah Indonesia dan partisipasi politik, dengan merujuk pada pengalaman NU dalam menghadapi demokrasi terpimpin di era Soekarno (1959-1965). Selama melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian ini, yaitu sumber-sumber yang digunakan sebagian besar berasal dari buku dan artikel ilmiah yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu, dianjurkan agar hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi perbandingan untuk memperkaya kompleksitas penelitian selanjutnya, serta kesalahan yang mungkin muncul dalam penelitian ini bisa diperbaiki agar pemahaman tentang demokrasi terpimpin dan NU dapat semakin mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukafi Niam. *Fragmen-Fragmen Muktamar NU Dari Era Kolonial Hingga Milenial*. Jakarta: Numedia Digital Indonesia, 2021.
- Adlin. *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013.
- Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1978.
- Alim, Suryawan Andian. "Peran Politik Idham Chalid Dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1956-1984." *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* Vol. 4, no. 7 (2019): 1-14.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya:

- Jayatu, 1985.
- Arifin, Moh Arif. "Idham Chalid dan Perannya Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966 M." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating; Quantitative and Qualitative Research*. Boston, USA: Pearson, 2012.
- Damm, Muhammad R. "The (Trans)Formation of Religious Capital in Indonesian Politics During New Order Era: A Case Study of Nahdlatul Ulama." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 8, no. 2 (2018): 154–57. <https://doi.org/10.14203/jissh.v8i2.96>.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: Pusat Kajian Islam dan Transformasi Sosial, 2009.
- Gorman, Jonathan. *Understanding History" An Introduction to Analytical Philosophy of History*. Ottawa, Canada: University of Ottawa Press, 1992.
- Hanapiah, Pipin. *Analisis Politik*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2001.
- Heidhues, Mary Somers. "The 1965-66 Elimination of Indonesian Communists: Two Recent Re-Readings." *Archipel* Vol. 101, no. 1 (2021): 255–58. <https://doi.org/10.4000/archipel.2460>.
- Hidayat, Asep Achmad, Andri Nurjaman, Jafar Ahmad, Doli Witro, & Raid Alghani. "Nahdlatul Ulama in Facing the Guided Democracy 1959-1965: An Overview of Social and Political Factors." *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 20, no. 2 (2022): 567–98. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1069>.
- Hidayat, Rina Andriani. "The Existence of The Nahdlatul Ulama Party in The Guided Democracy Era." *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* Vol. 3, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.35672/jnus.v3i1.1-21>.
- Indrajat, Himawan. "Demokrasi Terpimpin: Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi." *Jurnal Sosiologi* Vol. 18, no. 1 (2014): 53–62.
- Jainuddin. "Islam dan Politik Orde Lama: Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 3, no. 2 (2019): 225–43. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.470>.
- Junaedi, Anjar. "Perilaku Politik Nadhlatul Ulama (NU) Pada Tahun 1952-1965." *Skripsi*. Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Sleman: Tiara Wacana, 2018.
- Kusumastuti, Adhi, & Admad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lune, Howard, & Bruce Lawrence Berg. *Methods for the Social Sciences Global Edition*. Harlow, UK: Pearson, 2017.
- Mietzner, Marcus, & Burhanuddin Muhtadi. "The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* Vol. 42, no. 1 (2020): 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>.
- Muhammad. "Nahdlatul Ulama dan Perubahan Budaya Politik Di Indonesia." *El-Harakah* Vol. 12, no. 1 (2010): 57–65.
- Pardiyo. "Dewan Nasional: Suatu Badan Penasehat Pemerintah 1957-1959." *Skripsi*. Universitas Indonesia, 1989.
- Pribadi, Toto, Ali Muhyidin, & Susanti. *Pendekatan Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, 2017.
- Ricklefs, Marle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Sigit Parikeset & Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*. Jakarta: Banana Books, 2016.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Sultana, Tasneem. "The Evolution of Democracy through the Ages: Focus on the European Experience." *Journal of European Studies* Vol. 28, no. January 2012 (2012): 27–50.
- Thohari, Muhammad. "K.H. Abdul Wahab Hasbullah: Kiprahnya Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Zamharir, Hari, TB Massa Dja'far, Sahrudin Lubis, and Siti Sadiyahunnimah. "Elite Deliberation as Deliberative Democracy: Experience of Walisongo and Nahdlatul Ulama in Indonesia." *Journal of Social Political Sciences* Vol. 1, no. 4 (2020): 285–97.
- Zuhri, Saifuddin. *Autobiografi KH. Saifuddin Zuhri: Berangkat Dari Pesantren*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1984.